

ABSTRAK

ANDRIYAN. NIM: E.1611247 “Analisis Hukum Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023.

Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang selama dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering melakukan perampasan terhadap kendaraan milik kreditur yang bermasalah, perilaku menjadi masalah hal ini dikarenakan, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam, perbuatan penagihan utang secara paksa dan kekerasan oleh *debt collector* merupakan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur melaporkan tindakan-tindakan *debt collector* tersebut ke kepolisian khususnya dalam hal menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia oleh oknum *debt collector* supaya tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan gejala-gejala hukum atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan fungsi dan peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penanganan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik Polri pada Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penanganan penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, kemudian terkait dengan tindak pidana yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* maka pelaksanaan penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHAP yang berlaku. Adapun akibat hukum yang timbul dari pengambilan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* ialah perusahaan leasing yang akan dirugikan. Kerugian leasing dalam pengambilan paksa oleh *debt collector* adalah dengan kemungkinan adanya pemidanaan karena penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur merupakan perbuatan melanggar hukum. Pada dasarnya pertanggungjawaban tersebut melekat pada perusahaan leasing mengingat adanya kerjasama antara perusahaan leasing dengan perusahaan jasa *debt collector*. Hal inilah yang harus menjadi tendensi penerapan pemidanaan atas penarikan paksa kendaraan debitur oleh *debt collector*.

Kata Kunci : Penarikan, Kendaraan Bermotor, dan *Debt Collector*

ABSTRACT

ANDRIYAN. NIM: E.1611247 "Legal Analysis of Motorized Vehicle Withdrawals by Debt Collectors in a Criminal Law Perspective". Essay for Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023. The use of debt collectors in finance companies is not prohibited.

As long as it is carried out in accordance with established procedures and does not violate existing norms and rules. However, in practice, debt collectors often confiscate vehicles belonging to troubled creditors, behavior has become a serious problem to date. The problem is, there are no clear boundaries and rules regarding billing procedures by a debt collector. At present, there are only regulations for each bank and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which provide guarantees to debtors and creditors in the process of executing or withdrawing vehicles with bad credit, terrorize either in person or over the phone, even to the point of threatening it can be said that the act of forcible debt collection and violence by the debt collector is an act that leads to a crime, so there is nothing wrong if the debtor reports the actions of the debt collector to the police, especially in matters tackling cases of motorized vehicle confiscation as a fiduciary guarantee by unscrupulous debt collectors in order to create security and order in society. This study uses a normative juridical approach, namely research that seeks to describe legal phenomena or legal facts related to the function and role of the Bogor Police Criminal Investigation Unit in handling motorized vehicle withdrawals by Debt Collectors. The results of the study show that the role of Polri investigators at the Bogor Police Criminal Investigation Unit in handling motor vehicle withdrawals by debt collectors is guided by Kapolri Regulation No. 8 of 2011 concerning Safeguarding the Execution of Fiduciary Guarantees, then related to crimes that occur during executions carried out by debt collectors, the handling is carried out in accordance with the provisions of the applicable Criminal Code and Criminal Procedure Code. As for the legal consequences arising from the forced repossession of vehicles by debt collectors, it is the leasing company that will be harmed. The disadvantage of leasing in forced retrieval by a debt collector is the possibility of criminal prosecution due to confiscation carried out by a debt collector who forcibly takes a vehicle from a debtor is an unlawful act. This should be the tendency for the application of punishment for the forced withdrawal of the debtor's vehicle by the debt collector.

Keywords: *Withdrawal, Motorized Vehicles, and Debt Collector*